

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah adalah masalah yang cukup mengganggu dalam kehidupan masyarakat. Volume sampah yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir adalah masalah yang harus segera dipecahkan. Apabila jika sampah-sampah tersebut dibiarkan, akan terjadi penimbunan sampah yang pada akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat terutama di kota-kota besar telah meningkatkan jumlah timbunan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Peningkatan jumlah sampah ini tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah (Selintung, Zubair, Anneke T, 2013: 1).

Sampah yang ditimbulkan dari aktivitas dan konsumsi masyarakat perkotaan ini, telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani oleh setiap pemerintah kota dengan dukungan partisipasi aktif dari masyarakat perkotaan itu sendiri. Salah satu bentuk upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi dan mengelola persoalan mengenai sampah adalah telah dirumuskannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penanganan Sampah (UUPS). Di dalam UUPS tersebut terdapat penjelasan bahwa penanganan sampah terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan

sampah yang dimaksud meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan sampah.¹

Berbicara mengenai pengelolaan lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah tidak dapat dipisahkan dari peranan perempuan. Perempuan merupakan agen perubahan dan memberi pengaruh besar terhadap kualitas lingkungan hidup. Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, mereka lebih banyak berinteraksi dengan lingkungan. Posisi yang masih belum juga menguntungkan membuat perempuan sering dipandang sebelah mata. Hal ini diakibatkan oleh kuatnya budaya patriarki yang telah mengakar di masyarakat, sehingga membuat tergesernya kedaulatan perempuan. Perempuan sering tidak dilibatkan dalam sebagian besar kebijakan dan kontrol terhadap sumber daya alam yang menopang kehidupan mereka (Pratiwi, 2016: 5).

Selama ini partisipasi perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup belum optimal mengingat adanya pandangan bahwa adanya hambatan fisik bagi perempuan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup, serta kebijakan publik pengelolaan lingkungan hidup yang belum pro gender. Gender seringkali disamakan maknanya dengan perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Namun sejatinya, isu gender berkaitan dengan peran, posisi dan tanggung jawab perempuan maupun laki-laki di dalam masyarakat dan hubungan peran-peran tersebut. Meningkatkan peran serta perempuan merupakan langkah yang perlu mendapat perhatian agar perempuan mampu untuk berperan sebagaimana lawan jenisnya dalam setiap kegiatan di masyarakat. Perempuan

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penanganan Sampah

selama ini banyak dilibatkan pada kegiatan domestik mulai dari penyediaan air bersih, pengelolaan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, berbelanja kebutuhan rumah tangga. Tugas-tugas yang kurang memiliki makna ekonomi sehingga perempuan menjadi kelompok yang terikat dalam ketergantungan dengan laki-laki. Laki-laki yang banyak bergerak pada kegiatan produktif dan mempunyai nilai ekonomi. Sejak disadari betapa pentingnya melibatkan perempuan untuk mengelola lingkungan karena sifat yang dimiliki perempuan yakni ketelatenan, ketekunan, dan memiliki kegiatan yang terkait langsung dengan lingkungannya maka muncul gagasan untuk melibatkan perempuan dalam pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan mulai dari lingkup mikro sampai lingkup makro. Perempuan dapat berdaya melalui pembentukan organisasi kelompok yang beraneka ragam tujuannya. Perempuan yang bekerja dengan perempuan lain dalam organisasi atau kelompok akan menjadi lebih berdaya. Sebab jaringan kerja dan berorganisasi merupakan tindakan kolektif yang cenderung memperkuat proses pemberdayaan sosial budaya, psikologis dan politik bagi perempuan (Eko, 2005: 59).

Perempuan diharapkan dapat proaktif jika telah terjadi ketidakadilan dalam bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Melalui kelompok di luar pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat, perempuan dapat aktif mengawasi terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pemberdayaan perempuan tentang lingkungan hidup perlu diberikan kepada perempuan. Perempuan memiliki andil yang sangat besar di kehidupan rumah tangga, sehingga mereka akan lebih mudah mengorganisir gerakan-gerakan pro

lingkungan di lingkup rumah tangganya masing-masing. Selain itu perempuan atau ibu merupakan media edukasi pertama bagi anak-anak. Melalui ibu, pendidikan dan kesadaran mengenai kepedulian terhadap lingkungan dapat ditanamkan pada anak-anak sejak dini.

Kota Magelang merupakan kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun Magelang kotanya tidak cukup luas, namun objek wisatanya cukup komplit. Oleh karena itu tidak heran lagi kalau banyak wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke kota ini. Hal ini yang membuat jumlah sampah di Kota Magelang semakin meningkat. Minimnya jumlah kendaraan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Magelang mengakibatkan juga lambatnya pengangkutan sampah, secara langsung menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya seperti udara yang tidak sedap, penyumbatan saluran air, sumber penyakit dan tentunya pada keindahan Kota Magelang itu sendiri.

Dari tahun ke tahun, data statistik menunjukkan bahwa masalah sampah di Kota Magelang terus meningkat. Jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2012 mencapai 119.329 jiwa² dan volume timbulan sampah yang dihasilkan adalah 208,85 m³/hari (KLH, 2013).³

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Magelang dan Volume Sampah yang Terkumpul di TPS

Tahun	Jumlah Penduduk	Volume sampah (m ³ /hari)
2010	126.443	207,18
2011	118.805	193,94
2012	119.329	208,85

(Sumber: Kota Magelang Dalam Angka, 2011, 2012, dan 2013)

² Kota Magelang Dalam Angka tahun 2011, 2012, dan 2013

³ Kantor Lingkungan Hidup Kota Magelang tahun 2013

Cara penyelesaian yang ideal dalam penanganan sampah di kota Magelang adalah dengan pengelolaan sampah terpadu. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Untuk itu pemerintah Kota Magelang membuat program inovasi yang dianggap mampu membantu dalam hal pengelolaan sampah, program tersebut adalah Kampung Organik, program ini merupakan inovasi dari Wali Kota Magelang, Bapak Ir. H. Sigit Widyonindito.

Kampung Organik merupakan satu kawasan yang dimana ada sekelompok masyarakat di dalam kegiatannya secara terorganisir melakukan pemilahan dan pengolahan sampah organik dan non-organik (melalui 3R) yaitu *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* secara berkelanjutan dan memanfaatkan hasil pengolahan sampah tersebut untuk menjadikan suatu kawasan hijau dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga secara berkelanjutan.⁴ Prinsip *Reduce* dilakukan dengan cara sebisa mungkin melakukan minimalisasi barang atau material yang dipergunakan. Prinsip *Reuse* dilakukan dengan cara sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali dengan menghindari pemakaian barang-barang sekali pakai. Prinsip *Recycle* dilakukan dengan cara sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi itu dapat didaur ulang (Wahyuningsih, 2014: 9). Kepala Bappeda Joko Suparno mengatakan, untuk pengelolaan sampah peringkat pertama

⁴Dilihat <https://dkptkotamagelang.wordpress.com/2014/10/08/kampung-organik-7/> diakses pada 17 Maret 2018 pukul 14.01 WIB

diraih Kota Surabaya, kedua Kota Magelang itu sendiri dan yang terakhir Kota Bontang.⁵

Program Kampung Organik antara lain bertujuan memberdayakan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal dilakukan untuk tercapainya pembaharuan dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dengan pemberdayaan masyarakat, diharapkan terwujudnya masyarakat yang berkualitas yang mampu menghadapi era globalisasi (Soetomo, 2012: 89)..

Bagi Walikota Magelang, Sigit Widyonindito inovasi kampung organik menjadikan masyarakat berperan penting dalam pengelolaan sampah. Mereka melaksanakan pemilahan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah rumah tangga. Petugas kebersihan hanya mengangkut sampah residu yang benar-benar sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali maupun didaur ulang. Kini ada kelompok pengelola sampah di tiap-tiap lingkungan. Semula hanya ada di beberapa kelurahan. Pengelolaan sampah berkembang sesuai dengan karakter masyarakat. Untuk menjaga keberlanjutan program, sejak 2013 dibentuk fasilitator mulai tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan. Fasilitator bertugas mendampingi dan mengarahkan kelompok pengelola sampah agar tetap sesuai dengan konsep dan tujuan kampung organik.⁶

⁵ Dilihat <http://www.magelangkota.go.id/home/detail/20150221TL070230> diakses pada 17 Maret 2018 pukul 14.08 WIB

⁶ Dilihat <http://www.jpip.or.id/artikelview-456-sulap-sampah-menjadi-berkah.html> diakses pada tanggal 14 April 2018 pukul 21.41 WIB

Sebelum resmi mencanangkan program tersebut, sebenarnya di Kota Magelang sudah ada 3 wilayah rintisan kampung organik, yaitu di Kampung Kalisari Kelurahan Wates, Kampung Bodongan Kelurahan Kramat Selatan, dan RW 4 Kelurahan Tidar Selatan. Dalam pengembangan kampung organik, khususnya di Kampung Kalisari Kelurahan Wates, sejak Maret 2012 beberapa aktivis PKK dipelopori Nur Lamiah membentuk Paguyuban Perempuan Pengolah Sampah Terpadu "Legok Makmur", anggota paguyuban belajar mengolah sampah organik menjadi kompos. Anggota paguyuban itu, yang hanya 6 orang, tiap sore mengolah sampah organik, meliputi kulit buah, sisa-sisa sayuran, dan dedaunan. Meski cara pembuatan kompos itu masih tergolong sederhana, mereka antusias melakukan. Anggota memotong dan mencacah sampah organik yang diperoleh dari masyarakat sekitar dengan menggunakan parang atau golok⁷. Dalam pengembangan Kampung Organik Kalisari Legok Makmur ini lebih dalam melibatkan perempuan di dalamnya. Kerja keras anggota paguyuban ini mendapat apresiasi dari Kantor Lingkungan Hidup. Bahkan pertengahan 2013 paguyuban itu mendapat bantuan operasional dari Badan Ketahanan Pangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Rp 47 juta. Uang itu digunakan untuk membuat rak tanaman, membeli pot, polybag, kompos, bibit tanaman, dan kebutuhan lainnya. Seiring berjalannya waktu, kini Kampung Kalisari identik dengan Kampung Organik dan menjadi tujuan studi banding bagi pelajar, mahasiswa, dan pegawai instansi pemerintah dari daerah lain. Anggota paguyuban sering diminta oleh LSM dan Pemerintah Desa di Muntilan, Srumbung

⁷Dihat <https://gagasanhukum.wordpress.com/2013/11/18/pemasyarakatan-kampung-organik/> diakses pada 6 Maret 2018 pukul 19.58 WIB

(Kabupaten Magelang), Pakem, Cangkringan (Kabupaten Sleman DIY) dan beberapa wilayah di Kota Magelang guna memberi pelatihan teknik mengolah sampah dan budi daya tanaman organik.

Dengan latar belakang seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka peneliti mengambil judul mengenai:

“POLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM KAMPUNG ORGANIK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN (Studi Kasus Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu Legok Makmur di Kelurahan Wates, Kota Magelang).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka mendapatkan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” dalam program Kampung Organik di Kota Magelang?
2. Apa sajakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dan dampak yang ditimbulkan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” dalam program Kampung Organik di Kota Magelang?

3. Apakah dengan adanya program pemberdayaan ini berhasil memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi lebih menjadi otonom (sebagai manusia yang sejajar) atau menjadi beban ganda?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pola pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” dalam program Kampung Organik di Kota Magelang.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dan dampak yang ditimbulkan pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” dalam program Kampung Organik di Kota Magelang.
3. Untuk menjelaskan posisi perempuan dengan adanya program pemberdayaan ini berhasil memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi lebih menjadi otonom (sebagai manusia yang sejajar) atau menjadi beban ganda.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian tadi, maka adapun manfaat penelitian yaitu penelitian diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis merupakan sumbangan penting dalam menambah wawasan, khususnya dalam pemberdayaan perempuan. Penelitian ini secara teoritis menambah suatu konsep yang dapat dijadikan sebagai bahan-bahan penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai pemberdayaan-pemberdayaan perempuan lain dalam pengelolaan sampah. Dari penelitian ini diharapkan memperkuat teori-teori pembangunan, pemberdayaan masyarakat, evaluasi program dan feminisme liberal.

1.4.2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia yang masih kesulitan dalam proses pembangunan lingkungan. Sehingga secara luas akan dapat dijadikan referensi untuk pembangunan dan pengelolaan lingkungan dengan kebijakan berbasis masyarakat/perempuan.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui pemberdayaan perempuan dalam program pengelolaan sampah yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Magelang, khususnya program Kampung Organik dan mengetahui bagaimana pola pemberdayaan, faktor-faktor pendukung dan penghambat dari pemberdayaan yang sebenarnya terjadi serta posisi perempuan dengan adanya program pemberdayaan ini berhasil memberdayakan perempuan dalam bidang

ekonomi lebih menjadi otonom (sebagai manusia yang sejajar) atau menjadi beban ganda. Sehingga masyarakat terutama perempuan dapat ikut dilibatkan dalam memperbaiki kota dengan program-program yang lain dan merasakan hasilnya.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Bagian kerangka pemikiran teoritis ini adalah dipaparkan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian secara sistematis dan analitik, kemudian peneliti menarik benang merahnya.

Penelitian terdahulu yang ditampilkan pada bagian ini bertujuan untuk membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan sejumlah penelitian pernah dilaksanakan oleh orang atau pihak lain. Hal-hal yang ditekankan pada penelitian terdahulu, meliputi: konsep yang digunakan, pendekatan dan metode penelitian, hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pemberdayaan Perempuan melalui Program Pengelolaan Sampah di Paguyuban Pengolah Sampah Mandiri Mawar Dusun Randugunting Tamanmartani Kalasan Sleman oleh Rokhmatun Khasanah (2015). Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemberdayaan perempuan melalui Pengelolaan Sampah meliputi beberapa tahapan : a) Tahap penyadaran dan pembentukan dengan sosialisasi, untuk menyadarkan masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah, pentingnya menjaga lingkungan dan mengetahui potensi-potensi yang dimiliki perempuan, Hasil yang diperoleh setelah melewati tahapan

ini adalah masyarakat menjadi sadar akan pentingnya pengelolaan sampah, b) Tahap transformasi pengetahuan dan ketrampilan berupa pelatihan pengelolaan sampah seperti pelatihan pembuatan kerajinan, composting dan bank sampah, Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan. Tahap ini perempuan diberikan pelatihan pengelolaan sampah seperti pelatihan pembuatan kerajinan, composting dan bank sampah. Hasil yang didapatkan bahwa para pengurus dan anggota PPSM MAWAR memiliki kemampuan untuk mengelola sampah dengan berbagai cara, selain itu perempuan juga diajarkan untuk lebih mandiri yang hasilnya bisa membantu menambah penghasilan keluarga, c) Tahap peningkatan kemampuan intelektual dengan pelaksanaan kegiatan program pengelolaan sampah. Pada tahap ini perempuan diharapkan bisa mengaplikasikan dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diajarkan baik untuk diri sendiri. maupun menularkan pengetahuannya kepada orang lain dengan memberikan pelatihan. Melalui kegiatan tersebut ilmu yang didapat bisa lebih berkembang dan bermanfaat. Perempuan dikatakan mandiri apabila telah melewati tahap-tahap pemberdayaan di atas, karena sudah memiliki kemampuan dan keterampilan yang bisa dipakai untuk diri sendiri dan orang lain, serta bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga. (2) Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi adanya semangat dan keinginan dari diri sendiri, kesadaran masyarakat dan dukungan keluarga, tersedianya fasilitas dan sarpras. Faktor penghambat meliputi kesibukan masing-masing anggota, kurangnya rasa memiliki PPSM MAWAR, pemasaran produk

belum lancar, terbatasnya kendaraan dalam pengambilan sampah (Khasanah, 2015 :10-12).

Pembedayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Dukuh Mrican Sleman Yogyakarta oleh Fatma Mohammad, Dharma Cakrawartana Sutra, Endang Kusnawati (2012). Penelitian yang diupload dalam Jurnal Health & Sport, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2012 menjelaskan Studi banding dan dvokasi efektif untuk meningkatkan partisipasi sosial masyarakat dalam pengolahan sampah secara mandiri. Adanya peningkatan pengetahuan warga tentang sampah dan teknik pengolahan sampah setelah intervensi dilaksanakan. Adanya peningkatan sikap positif warga terhadap upaya pengolahan sampah secara mandiri setelah intervensi. Praktek model pengolahan sampah yang dapat dilaksanakan adalah pemilahan sampah, pengolahan sampah menjadi kompos dan kerajinan sampah plastik dan kain perca. Adanya penurunan jumlah warga yang membuang sampah ke sungai. Adanya konvensi yang mengikat seluruh warga RW 06 Pringgodani bahwa warga tidak boleh membuang sampah di sungai (Mohammad, 2012: 697).

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah, di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul oleh Pitri Nurhidayah (2017). Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah di Dusun Serut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat. Kegiatan rutin yang dilakukan antara lain arisan rutin, pemilihan sampah, menabung sampah dan sosialisasi. Evaluasi kegiatan dilaksanakan pada saat arisan rutin akan tetapi belum memiliki dampak yang maksimal. Bentuk pemandirian atau pendampingan yang dilakukan pengurus Bank Sampah Azola

kepada masyarakat dengan sering mengadakan pelatihan-pelatihan mengenai pengelolaan sampah dan pembuatan kerajinan yang berbahan dasar sampah kepada warga masyarakat Dusun Serut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan masyarakat melalui pengelolaan Bank Sampah Azola di Dusun serut yakni pembagian kerja, kinerja pengurus dan partisipasi masyarakat. Bank Sampah Azola sudah terdapat pembagian kerja namun belum spesifik, sehingga pengurus belum mampu bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pembagian pengurus hanya sebatas formalitas. Partisipasi masyarakat terhadap Bank Sampah Azola juga masih kurang, hal ini dikarenakan beberapa hal yaitu kesadaran dan kemauan masyarakat masih rendah, masyarakat cenderung tidak mau tahu dan kurang peduli dengan lingkungan, kendala waktu dan kesibukan masing-masing nasabah sehingga tidak bisa maksimal dalam mengikuti kegiatan bank sampah. Dampak pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Bank Sampah Azola di Dusun Serut dapat dilihat dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Aspek lingkungan dengan adanya Bank Sampah Azola dapat menciptakan lingkungan disekitar rumah warga menjadi lebih bersih, sehat, dan bebas dari sampah. Kegiatan bank sampah juga memberikan dampak pada aspek sosial yaitu menambah keakraban antara pengurus dan anggota. Dampak dari aspek ekonomi dengan adanya penabungan sampah di Bank Sampah Azola yaitu memberikan penghasilan tambahan meskipun belum mampu untuk mencukupi kebutuhan (Nurhidayah, 2017: 552-553).

Di dalam riset ini peneliti juga melihat keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Apakah mampu mengajak masyarakat untuk dapat lebih peduli dengan lingkungan sekitar ataupun tidak.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Rumah Pintar Pijoengan di Dusun Daraman, Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta oleh Maisaroh (2011).. Penelitian yang ia lakukan pada dasarnya ingin mengetahui tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui “Rumah Pijoengan” yang berada di Dusun Daraman. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat. Begitu juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat di Kampung Pelangi Semarang, namun disisi lain terdapat perbedaan dimana penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh lebih terfokus pada bagaimana Rumah Pijoengan yang ada di Dusun Daraman memberdayakan masyarakat sekitar, dampak pemberdayaan dan bagaimana hasil yang dicapai dari program pemberdayaan masyarakat melalui Rumah Pijoengan sedangkan peneliti menekankan bagaimana proses pemberdayaan yang ada di Kampung Pelangi Semarang, upaya apa saja yang dilakukan baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam pengembangan Kampung Pelangi dengan adanya pemberdayaan masyarakat di Kampung Pelangi Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Maisaroh menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang ada dirumah pintar Pijoengan bersifat edukasi.

Pemberdayaan dilakukan dengan pemberian pelatihan ketrampilan, pengarahan dan pengawasan dengan didukung berbagai fasilitas yang ada. Banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat adalah mereka dapat meningkatkan kualitas kehidupan mereka sehari-hari. Kehidupan warga masyarakat dapat lebih sejahtera dari sebelumnya, dengan adanya peningkatan ketrampilan yang ada. Bertambahnya wawasan dan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang mereka miliki, mengarahkan masyarakat menjadi masyarakat yang maju dan lebih modern. Hasil dari adanya pemberdayaan yang diadakan oleh rumah pintar pijoengan sudah hampir sesuai dengan tujuan utama yang ingin diwujudkan. Rumah pintar pijoengan ini memberikan hasil yang sangat diterima oleh masyarakat karena mereka menjadi masyarakat yang lebih berdaya guna, berkualitas, berwawasan luas dan berpengalaman. Pola pikir masyarakat sekitar rumah pintar pijoengan menjadi lebih terbuka, mereka dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, berbekal dengan pengetahuan dan ketrampilan yang mereka dapat selama dirumah pintar.

1.5.2 Teori Pembangunan (*Development Theory*)

Terdiri dari dua kata, yaitu teori dan pembangunan. Menurut Talizidihu Ndraha, secara etimologis berarti: (a) Sadar/siuman, (b) Bangkit dan berdiri, (c) Bentuk, (d) Membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan), dan behavioral (perilaku). Sedangkan Easton (1985), menyatakan bahwa pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup serta merealisasikan potensi yang ada secara sistematis. Proses sistematik paling tidak terdiri dari 3 unsur. Pertama, adanya input, yaitu

bahan masukan konservasi. Kedua, adanya proses konservasi, yaitu wahana untuk mengolah bahan masukan. Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konservasi yang dilaksanakan.

Menurut Bjorn Hettne pembangunan didefinisikan sangat kontekstual dan harus merupakan konsep terbuka yang harus didefinisikan terus menerus. Teori Pembangunan lebih memperhatikan perubahan sosial dibandingkan disiplin ilmu sosial lainnya. Tiga Nilai Inti Pembangunan menurut Profesor Goulet antara lain:

- a. Kecukupan yang berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Keberhasilan pembangunan ekonomi menjadi prasyarat terpenuhinya nilai ini.
- b. Harga Diri/Kemandirian (*self esteem*): menjadi manusia seutuhnya. Membangun tidak berarti menghilangkan kepribadian.
- c. Kebebasan dari Sikap Menghamba: kemampuan untuk memilih. Kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek material semata.

Sementara Todaro & Smith menyatakan bahwa “pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin demi mencapai kehidupan yang lebih baik.” Tiga Tujuan Inti Pembangunan yaitu: Peningkatan ketersediaan kebutuhan hidup pokok, peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial.

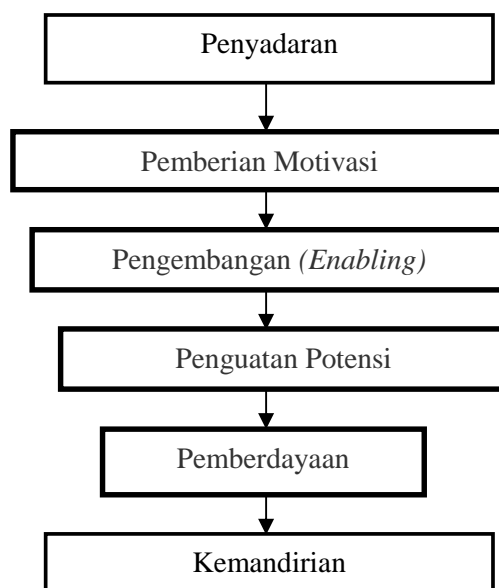
Fungsi Teori Pembangunan antara lain:

- a) Memilih apa yang penting dan yang kurang penting: suatu usaha yg tidak pernah lepas dari penilaian.
- b) Mengatur: menyusun kaitan-kaitan yg jelas dan berarti.
- c) Menerangkan: menunjukkan kaitan-kaitan yang jelas dan berarti.
- d) Bertindak: teori yang baik mempunyai manfaat praktis, sedang yg buruk disalahgunakan secara politis.

Pembangunan itu penting karena:

- a) Pengambil Kebijakan: Perlu tahu posisi pembangunan agar dapat menyusun kebijakan yg sesuai kebutuhan masyarakat.
- b) Lembaga Internasional: Perlu tahu seberapa jauh pembangunan bidang tertentu yang dibiayainya mempengaruhi masyarakat, untuk menentukan bantuan yg dapat diberikan berikutnya (Nugroho, 2008: 30).

Pelaksanaan upaya pengembangan masyarakat umumnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan sesuai yang direncanakan secara sistematis dan partisipatif dengan khalayak sasaran (Dumasari, 2014: 24)

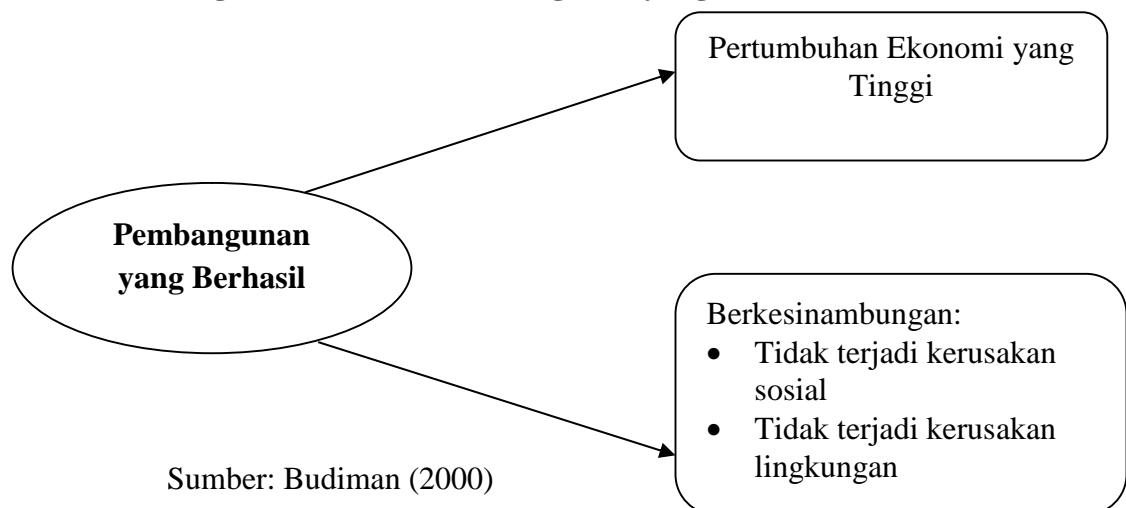


Bagan 1.1 Tahap Pengembangan Masyarakat

Sumber: Dumasari (2014)

Upaya pengembangan masyarakat yang bersifat praktis perlu diarahkan agar partisipatif. Dari sisi praktis, pengertian pengembangan masyarakat lebih menuju pada suatu proses pemecahan masalah, pendewasaan dan pemandirian agar memiliki daya terlepas dari segala bentuk kebodohan, ketertinggalan, kekuranganmampuan, kemarginalan, keterisoliran, ketakberdayaan dan kemiskinan. Berdasarkan paparan tentang Pengukuran Pembangunan di atas, Arief Budiman menyusun kriteria pembangunan yang berhasil, sebagai berikut:

Bagan 1.2 Kriteria Pembangunan yang Berhasil



1.5.3 Teori Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment Theory)

1.5.3.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Pemberdayaan adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan

sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang tersedia di lingkungannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan mempunyai motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Masyarakat dalam hal ini menjadi pelaku atau pusat proses pemberdayaan. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”. Pembangunan dipandang sebagai proses yang berkesinambungan dari peningkatan pendapatan riil per kapita melalui peningkatan jumlah dan produktivitas sumber daya.

Berdasarkan pendapat Sunyoto Usman (2003 : 40-47) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ;

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal pendekatan *bottom-up*. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan. Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama.

Model *bottom* memulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain model kedua ini menempatkan manusia sebagai subyek. Pendekatan “*bottom up*” lebih memungkinkan penggalian dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa “memiliki”, dan merasa turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang notabene memang untuk kepentingan mereka sendiri. Betapa pun pendekatan *bottom-up* memberikan kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik, namun tidak lepas dari kekurangannya, model ini membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan.

1.5.3.2 Tahap-Tahap Pemberdayaan

Wilson mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari (Bagan 1.2):

Pertama, menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik-awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat;

Kedua, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.

Ketiga, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan;

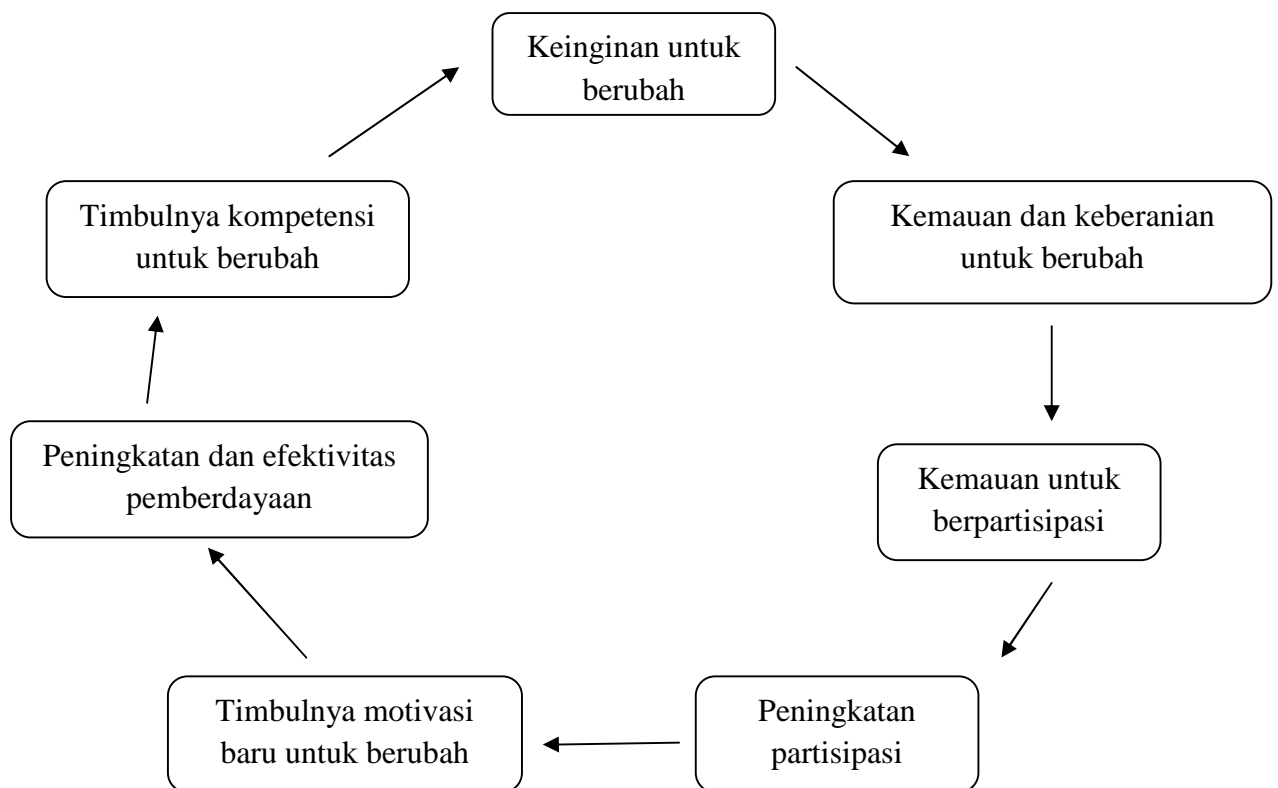
Keempat, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya;

Kelima, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan;

Keenam, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan;

Ketujuh, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Bagan 1.3 Siklus Pemberdayaan



Sumber: Mardikanto (2010:140)

Di lain pihak, Pendapat dari Totok Mardikanto (2010) mengemukakan bahwa tahapan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki 4 tahapan, antara lain (Mardikanto dan Soebiato, 2012: 123-128) :

1. Tahapan pertama seleksi lokasi.

Seleksi wilayah sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh lembaga pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan lokasi sangat penting agar pemberdayaan masyarakat akan tercapai seperti yang diharapkan. Seleksi lokasi untuk menentukan lokasi masyarakat miskin yang benar-benar harus diberdayakan.

2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat.

Melalui proses sosialisasi akan membantu menciptakan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan.

3. Proses pemberdayaan masyarakat

Hakekat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menungkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut ini :

- a. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah, permasalahan serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini dimaksud agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya.

Pada tahap ini diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses tersebut meliputi:

- a) Persiapan masyarakat dan pemerintahan setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya
 - b) Persiapan penyelenggaraan pertemuan
 - c) Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan
 - d) Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut
- b. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian meliputi:
- a) Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah
 - b) Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik
 - c) Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah
 - d) Pengembangan rencana kegiatan serta perorganisasian pelaksanaan
- c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok

Rencana yang telah disusun bersama-sama dengan dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika diperlukan

- d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (participatory monitoring dan evaluation/PME). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar prosesnya berjalan dengan tujuannya. PME adalah proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya

(pelaksanaannya) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan

4. Pemandirian masyarakat

Arah kemandirian masyarakat berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benar-benar mampu mengelola sendiri kegiatannya karena prinsip pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya. Proses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Dalam hubungan ini meskipun faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud *selforganizing* dari masyarakat, namun kita juga perlu memberikan perhatian terhadap faktor eksternalnya. Proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh satu tim fasilitator yang bersifat multidisiplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu faktor eksternal dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya secara mandiri.

Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat akan pelan-pelan berkurang dan akhirnya berhenti. Peran fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Kapan waktu kemunduran tim fasilitator tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program dengan warga masyarakat.

1.5.3.3 Prinsip-prinsip pendampingan masyarakat

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut :

1) Belajar Dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

2) Pendamping sebagai Fasilitator

Masyarakat sebagai Pelaku Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3) Saling Belajar

Saling Berbagi Pengalaman salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan

pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka (Gunawan, 1999: 138).

1.5.4 Teori Evaluasi Program (Program Evaluation Theory)

Evaluasi, riset evaluasi merupakan ilmu antar cabang ilmu pengetahuan. Evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu pengetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam praktik profesi. Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield (2007) mendefinisikan teori evaluasi program sebagai berikut:

“sebuah teori evaluasi program adalah serangkaian prinsip-prinsip konseptual, hipotetis, pragmatis, dan wujud yang koheren membentuk kerangka umum untuk memandu studi dan praktik evaluasi program”.

Menurut mereka teori evaluasi program mempunyai enam ciri, yaitu: pertalian menyeluruh, konsep-konsep inti, hipotesis-hipotesis teruji mengenai bagaimana prosedur-prosedur evaluasi menghasilkan keluaran yang diharapkan, prosedur-prosedur yang dapat diterapkan, persyaratan-persyaratan etikal, dan kerangka umum untuk mengarahkan praktik evaluasi program dan melaksanakan penelitian mengenai evaluasi program. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:

166), "secara umum evaluasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut".

Dari pengertian evaluasi diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses kegiatan pengukuran, menilai, menganalisis terhadap program atau kebijakan untuk menentukan hasil dari tujuan yang telah ditetapkan, sebagai pedoman pengambilan langkah dimasa yang akan datang.

Menurut Isaac dan Michael (1984: 6) sebuah program harus diakhiri dengan evaluasi. Hal ini dikarenakan apakah program tersebut berhasil menjalankan fungsi sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut mereka, ada tiga tahap rangkaian evaluasi program yaitu: (1) menyatakan pertanyaan serta menspesifikasikan informasi yang hendak diperoleh, (2) mencari data yang relevan dengan penelitian dan (3) menyediakan informasi yang dibutuhkan pihak pengambil keputusan untuk melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program tersebut.

Evaluasi program memiliki enam tujuan, yaitu: *Pertama*, memberikan masukan bagi perencanaan program. *Kedua*, menyajikan masukan bagi pengambil keputusan yang berkaitan dengan tindak lanjut, perluasan atau penghentian program. *Ketiga*, memberikan masukan bagi pengambil keputusan tentang modifikasi atau perbaikan program. *Keempat*, memberikan masukan yang berkenaan dengan faktor pendukung dan penghambat program. *Kelima*, memberi masukan untuk kegiatan motivasi dan pembinaan bagi penyelenggara, pengelola dan pelaksana program. *Keenam*, menyajikan data tentang landasan keilmuan bagi evaluasi program. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui empat hal utama (Warsito, 1986), yaitu: *Pertama*, efektivitas, yaitu melihat sejauh mana tujuan

telah dicapai atau mempertimbangkan antara tujuan yang direncanakan dengan tujuan yang telah dicapai. *Kedua*, efisiensi, yaitu melihat perbandingan antara input dan output dari segi waktu dan biaya/uang. *Ketiga*, mutu, yaitu melihat sejauh mana yang dilakukan menghasilkan mutu yang sesuai dengan/lebih baik daripada standard. *Keempat*, kegunaan, yaitu melihat apakah program yang dilaksanakan berguna bagi sasaran yang dituju (Permana dan Purnomo, 2014: 7).

1.5.5 Teori Feminisme Liberal (Liberal Feminist Theory)

Teori feminisme liberal pertama kali dirumuskan oleh Mary Wollstonecraft (1759-1799) dalam tulisan “The Vindication of The Right of Woman” dan John Stuart Mill dalam tulisannya “The Subjection of Women”, kemudian Betty Frei dan dalam tulisannya “The Feminim Mystique” dan “The Second State”. Mereka menekankan bahwa subordinasi perempuan berakar dalam keterbatasan hukum adat sehingga menghalangi perempuan untuk masuk ke lingkungan public (Hidayati, 1995: 86). “Masyarakat beranggapan bahwa perempuan dipengaruhi oleh kondisi alamiah yang dimilikinya, karena kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik dibanding laki-laki. Oleh karena itu, perempuan dianggap tidak mampu menjalankan peran di lingkungan publik. Anggapan inilah yang disangkal oleh feminisme liberal. Menurut mereka, manusia, perempuan atau laki-laki diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama dan harus pula mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya.

Menurut perspektif ini, jika leluasa berperan diluar rumah, perempuan pun akan dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Jadi, bukan kondisi alamiah

perempuan yang menyebabkan mereka kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik seperti laki-laki, melainkan persepsi masyarakatlah yang menentukan bagaimana seorang laki-laki dan perempuan berfikir, bertindak, dan berperasaan agar perempuan dapat berkembang seperti laki-laki. Perempuan harus berpendidikan sama seperti laki-laki. Dalam tradisi feminisme liberal, penindasan perempuan dikenal sebagai kurangnya kesempatan dan pendidikan mereka secara individual atau kelompok. Cara pemecahan untuk merubahnya, yaitu menambah kesempatan bagi perempuan terutama melalui institusi-institusi pendidikan dan partisipasi perempuan.

Perubahan-perubahan sosial tersebut menyediakan argumen-argumen politik maupun moral untuk gagasan-gagasan mengenai kemajuan, kontrak, sifat dasar dan alasan yang memutuskan ikatan-ikatan dan norma-norma tradisional. Akar teori feminisme liberal ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraan rasional, oleh sebab itu asumsi dasar dari feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Perempuan adalah makhluk rasional kemampuannya sama dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga dengan laki-laki.

Pada intinya kaum feminisme liberal menganggap bahwa perempuan dan laki-laki memang diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama pula untuk memajukan dirinya dalam berbagai hal oleh sebab itu aliran ini berupaya mempercepat tercapainya kesetaraan dan keadilan dalam berbagai bidang. Melalui suatu perdebatan terbentuklah teorisasi feminisme secara jelas dan meyakinkan

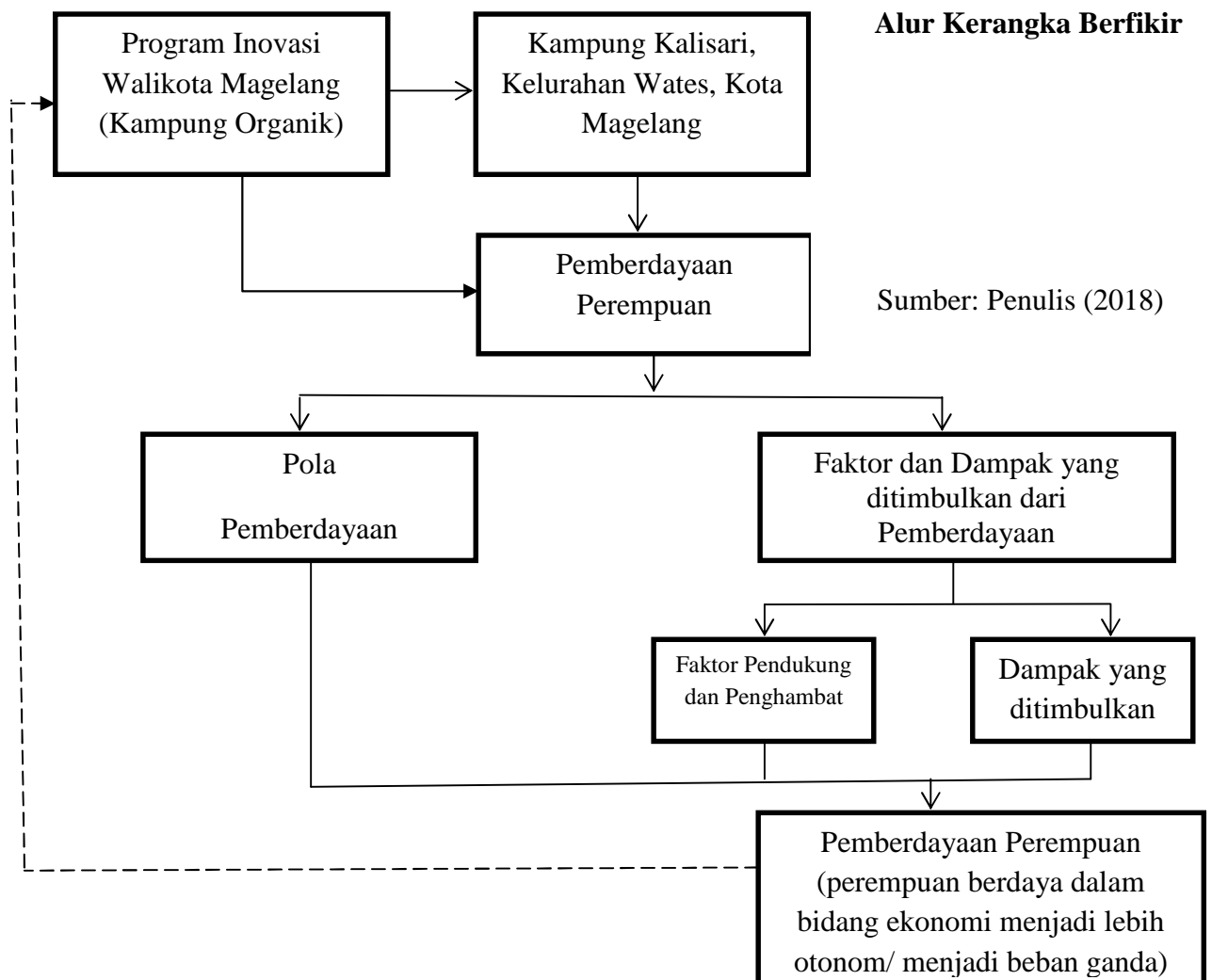
perdebatan ”persamaan dan perbedaan”. Persamaan dan perbedaan, keduanya adalah istilah yang kaya, kompleks dan diperjuangkan dalam hak-hak mereka sendiri. Orang-orang yang berkepentingan dalam menggambarkan posisi ideologi telah memetakan pencarian persamaan kedalam bentuk-bentuk feminisme liberal atau sosialis dan mencari perbedaan ke dalam bentuk feminisme radikal atau kultural (Squires, 1999: 115).

Salah satu tokoh feminisme liberal adalah Naomi Wolf, menurutnya feminisme liberal adalah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Menurut Wolf setiap manusia memiliki kapasitas untuk berfikir dan bertindak secara rasional. Untuk itu, perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia dalam kerangka “persaingan bebas” dan punya kedudukan setara dengan laki-laki. Perempuan lah yang harus membekali diri dengan bekal pendidikan dan pendapatan (ekonomi). Setelah perempuan mempunyai kekuatan dari segi pendidikan, pendapatan, perempuan harus terus menuntut persamaan (*equality*) haknya serta saatnya perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada laki-laki. Wolf memaparkan isu persamaan (*equality*) hak antara laki-laki dan perempuan serta perluasan hak-hak individu. keterlibatan perempuan dalam industrialisasi dan program pembangunan yang populer disebut *women in development*. Intinya ialah semua aksi pergerakan perempuan dilakukan sedikit demi sedikit tanpa mengganggu status quo kekuasaan.

Pada akhirnya laki-laki harus dipaksa memberikan tempat pada perempuan dalam segala kehidupan. Dengan menekankan bahwa untuk mengatasi rintangan sosial yang dihadapi perempuan diperlukan campur tangan pemerintah. Karena aliran feminisme liberal memandang sampai sekarang campur tangan pemerintah masih kurang peduli dengan masalah perempuan tersebut. Feminisme liberal berkeinginan untuk membebaskan perempuan dari peran gender yang opresif. Peran ini merujuk pada peran-peran sosial yang melekat pada perempuan yang dijadikan pembenaran untuk menempatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki di semua bidang sosial. Menurut feminisme liberal, patriarki adalah sumber operasi terhadap perempuan dan masyarakat patriarki cenderung mencampur adukkan arti antara seks dan gender.

Bagan 1.4

Alur Kerangka Berfikir



1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan (Hasan, 2002:21). Pengertian lain dari metode penelitian ialah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2013:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Menurut Darmadi (2013:153), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1.6.1 Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. (Sukmadinata 2009:53-60). Penelitian ini mengambil desain penelitian kualitatif yang mencoba menggambarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan serta melakukan analisis secara cermat dalam mengamati setiap fenomena yang dijumpai.

Berdasarkan definisi di atas penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan peneliti ingin menggambarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan dan serta melakukan analisis secara mendalam mengenai pola pemberdayaan perempuan melalui program kampung organik dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan pada Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu Legok Makmur Di Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang.

1.6.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah Kampung Kalisari, Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Kampung Kalisari dipilih karena dianggap sebagai salah satu kampung yang menjadi rintisan pemberdayaan perempuan dalam bidang kebersihan dan pengelolaan sampah yang mampu memberikan manfaat dan berkembang baik di lingkungan masyarakat. Di samping itu, juga mempertimbangkan alokasi dana dan kemudahan akses oleh peneliti.

1.6.3. Fokus Penelitian

Peneliti ingin secara mendalam menganalisis pola pemberdayaan, faktor pendukung dan penghambat serta dampak yang ditimbulkan dan melihat posisi perempuan berdaya dalam bidang ekonomi lebih menjadi otonom atau malah menjadi beban ganda dari pemberdayaan perempuan melalui program kampung organik dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan pada Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu Legok Makmur di Kelurahan Wates, Kota Magelang.

1. Aspek Pola Pemberdayaan

Di dalam aspek pola pemberdayaan ini, peneliti ingin secara mendalam menganalisis bagaimana pola pemberdayaan perempuan melalui program Kampung Organik dalam Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” di Kelurahan Wates Kota Magelang.

2. Aspek Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat serta Dampak yang ditimbulkan

Di dalam aspek faktor-faktor pendukung dan penghambat ini, peneliti akan menguraikan faktor-faktor pendukung dan penghambat serta dampak yang ditimbulkan pemberdayaan perempuan perempuan melalui program Kampung Organik dalam Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” di Kelurahan Wates Kota Magelang.

3. Aspek mengenai posisi perempuan dengan adanya program pemberdayaan Kampung Organik dalam Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” berhasil memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi lebih menjadi otonom (sebagai manusia yang sejajar) atau malah menjadi beban ganda.

1.6.4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Moleong (2010: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sejalan dengan definisi tersebut, Moeliono (1993:

862) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitian bahasa sebagai pelaku bahasa yang merupakan sasaran pengamatan atau informan pada suatu penelitian yang diadakan oleh peneliti.

Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampel* yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan atau disebut sampel yang dipilih secara sengaja. Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Informasi mengenai sejauh mana Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peranan dalam mengkoordinir pelaksanaan program Kampung Organik.
2. Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang
Informasi mengenai pelaksanaan dari pemberdayaan perempuan program Kampung Organik, anggaran yang digunakan dan peran kecamatan dalam program tersebut, yang mana Kelurahan Wates di bawah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Kecamatan Magelang Utara.
3. Ketua Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” Kelurahan Wates, Kota Magelang
Informasi mengenai pola pemberdayaan perempuan, faktor pendukung dan penghambat, dampak yang ditimbulkan dan mengenai posisi perempuan

dengan adanya program pemberdayaan ini berhasil memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi lebih menjadi otonom (sebagai manusia yang sejajar) atau menjadi beban ganda di Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” dalam program Kampung Organik, yang mana program ini oleh pemerintah Kota diserahkan kelurahan untuk melibatkan masyarakatnya.

4. 3 Anggota Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” Kelurahan Wates, Kota Magelang

Informasi mengenai faktor-faktor yang pendukung dan penghambat, dampak yang ditimbulkan serta mengenai posisi perempuan dengan adanya program pemberdayaan ini berhasil memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi lebih menjadi otonom (sebagai manusia yang sejajar) atau menjadi beban ganda pada Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” program Kampung Organik tersebut secara langsung dari lingkup yang lebih kecil yaitu para aktor/ pelaku dari pemberdayaan itu sendiri.

1.6.5. Jenis Data

Untuk mencapai semua tujuan penelitian, peneliti perlu menentukan secara tepat jenis data atau informasi yang dibutuhkan karena dapat membantu peneliti menciptakan pertanyaan-pertanyaan dengan kategori respon yang sesuai. Berguna bagi perancang survei untuk memikirkan pertanyaan sebagai pengumpulan informasi dari kategori utama yakni opini, sikap, dan motif; kepercayaan dan persepsi, perilaku, fakta dan atribut, dan pengetahuan (Ulber Silalahi, 2009: 286).

Jenis data yang digunakan berupa data kualitatif dengan bentuk:

1. Kata-kata dan tindakan.

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Pencatatan data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau perekaman *video/ audio tapes* yang berkaitan dengan pola pemberdayaan perempuan Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” dalam program Kampung Organik di Kota Magelang.

2. Sumber Tertulis

Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis adalah sumber buku, arsip, dokumen resmi yang berkaitan dengan pola pemberdayaan perempuan Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” dalam program Kampung Organik di Kota Magelang.

3. Foto

Foto digunakan sebagai alat untuk keperluan penelitian kualitatif. Foto dapat menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan untuk menelaah segi-segi subyektif dan hasilnya dianalisis secara induktif. Ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri seperti foto sebelum dan sesudah program inovasi itu dicanangkan dan kondisi

lingkungan saat ini setelah muncul program tersebut (Bogdon dan Biklen, 1882: 102).

4. Data Statistik

Penelitian kualitatif juga sering menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi peneliti. Data statistik dapat membantu memberi gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian.

1.6.6. Sumber Data

Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data merupakan faktor yang paling penting dalam penelitian. Berdasarkan masalah penelitian data yang digunakan untuk memecahkan masalah adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sumber utama (*first-hand information*) termasuk observasi lapangan, hasil wawancara terhadap informan dan dokumentasi lapangan. Keuntungan menggunakan data primer yaitu sesuai dengan tujuan penelitian dan dikumpulkan dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dan dikontrol oleh peneliti (Silalahi, 2010: 289-290). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari data wawancara, observasi dan foto dari informan yang meliputi Kepala Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota; Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Magelang Utara; Ketua Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur”; dan

anggota Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” serta melalui observasi dan dokumentasi secara langsung di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan studi yang sedang dilakukan saat ini tetapi untuk beberapa tujuan lain. Sedangkan, data primer merupakan informasi yang dikumpulkan terutama untuk tujuan investigasi yang sedang dilakukan (Hendri, 2009: 1).

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

1.6.7. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2010:51) pengertian dari teknik pengumpulan data adalah : “Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.” Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi penentuan teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

1. Observasi

Menurut Kartono (dalam Basuki, 2006: 12) observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Banister (dalam Poerwandari, 2001) menyatakan bahwa observasi menjadi metode paling dasar dan paling tua dari ilmu-ilmu sosial, karena dalam cara-cara tertentu kita selalu

terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian psikologis, baik itu kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya.

Dalam penelitian ini observasi dilakukan secara terus terang di mana dalam melakukan pengumpulan data peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Observasi dilakukan dengan cara terjun langsung di Kampung Kalisari, Kelurahan Wates Kota Magelang dengan melihat pola pemberdayaan, faktor-faktor pendukung dan penghambat dan posisi perempuan dengan adanya program pemberdayaan ini berhasil memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi lebih menjadi otonom (sebagai manusia yang sejajar) atau malah menjadi beban ganda pada Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” dalam program Kampung Organik di Kota Magelang.

2. Wawancara

Menurut Moleong (1990) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang akan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Kartono (dalam Basuki, 2006) *interview* atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.

Ada beberapa macam kegiatan wawancara yang dikelompokkan yang berdasarkan cara pelaksanaannya, yakni wawancara tertutup, terbuka, konferensi, kelompok, individual, terpimpin, bebas.

1) Wawancara Tertutup

Wawancara tertutup ialah suatu kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara tertutup. Pewawancara harus menjaga atau merahasiakan nama maupun sebuah informasi mengenai narasumbernya dengan cara memalsukan atau memberi sebuah inisial nama narasumber.

2) Wawancara Terbuka

Wawancara terbuka ialah sebuah wawancara yang dilakukan dengan tidak merahasiakan sebuah informasi yang mengenai narasumbernya dan juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang tidak terbatas atau tidak terikat jawabannya dan secara mendalam.

3) Wawancara Konferensi

Wawancara konferensi ialah sebuah wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara dengan sejumlah narasumber dan sebaliknya yang dilakukan di sebuah acara-acara televisi atau *talk show*, wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara kepada sejumlah narasumber di acara formal atau diskusi publik.

4) Wawancara Kelompok

Wawancara kelompok ialah sebuah wawancara yang dilakukan oleh sejumlah pewawancara kepada suatu narasumber dan dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Hal ini hampir sama dengan wawancara

konferensi, tetapi pada wawancara kelompok suatu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh setiap pewawancara berbeda-beda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terbuka dan mendalam yaitu metode wawancara dengan bertemu langsung dengan informan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian untuk mengumpulkan data atau informasi yang kompleks.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber, misal LSM. Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006:231) yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Pada penelitian ini dokumentasi yang dibutuhkan adalah catatan, transkrip, arsip dan informasi melalui media cetak maupun online yang mendukung untuk mendapatkan data mengenai pola pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Paguyuban Perempuan Pengelola Sampah Terpadu “Legok Makmur” dalam program Kampung Organik di Kota Magelang.

1.6.8. Analisis dan Interpretasi Data

Menurut Mills (2000) Analisis data adalah upaya yang dilakukan oleh guru yang berperan sebagai peneliti untuk merangkum secara akurat data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipercaya dan benar. Interpretasi data adalah upaya peneliti untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis dapat disajikan dalam bentuk uraian, tabel, atau grafik analisis data dilakukan dengan cara memiliki, memilih, mengelompokkan data yang ada, merangkuminya, kemudian menyajikan dalam bentuk yang mudah dibaca atau dipahami.

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha untuk mencari pola, model, makna dan keterkaitan dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan setelah menggali data dari informan dimana setelah data tersebut ditelaah langkah selanjutnya yaitu data direduksi, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data. Penyajian hasil analisis data kualitatif dapat dibuat dalam bentuk uraian singkat, bagan alur, atau tabel sesuai hakikat data yang dianalisis. Ada 3 langkah yang biasa diikuti dalam menganalisis data kualitatif:

- a. Menyeleksi dan menfokuskan, dan mengorganisasikan data sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- b. Mendeskripsikan atau penyajian data dalam bentuk narasi, tabel atau grafik.
- c. Menarik kesimpulan dalam bentuk formula atau narasi singkat.

Analisis penyajian dari interpretasi hasil analisis sangat perlu dilakukan agar:

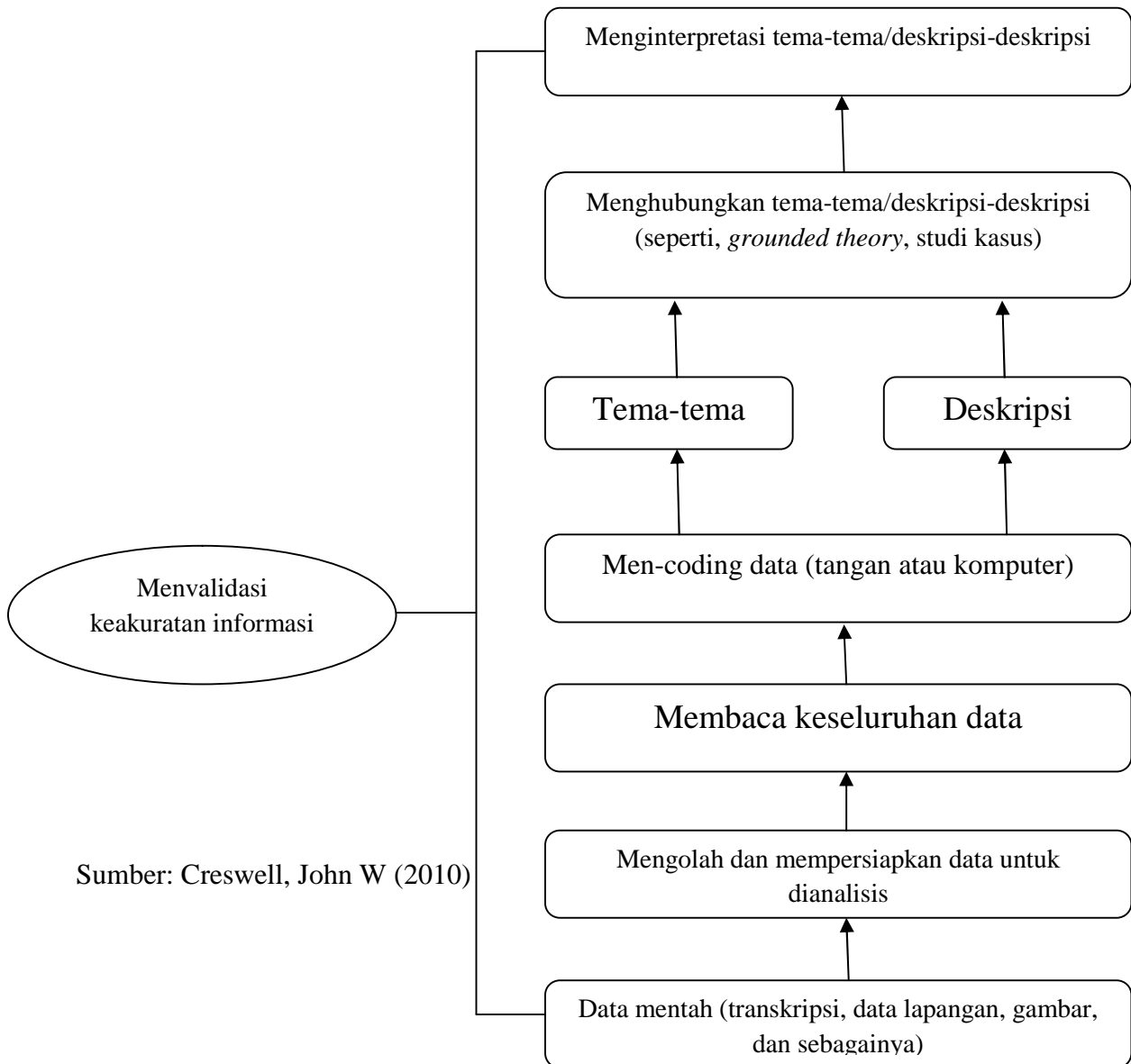
- a) Data dapat dibaca dengan mudah
- b) Peneliti dapat memaknai data tersebut
- c) Data dapat diinterpretasikan
- d) Pertanyaan penelitian dapat dijawab

Data kualitatif dianalisis dengan statistik, deskriptif untuk menemukan presentase dan nilai rata-rata. Analisis yang akurat dan cara penyajian yang tepat akan memungkinkan tafsiran/interpretasi hasil penelitian yang akurat dan valid oleh sebab itu, guru harus berhati-hati dalam melakukan analisis. Kekurangan akuratan dapat diminimalkan dengan melakukan *cross check* dengan sumber data atau dengan data lain yang sejenis.

Bagan 1.5 mengilustrasikan pendekatan linear dan hierarkis yang dibangun dari bawah ke atas, tetapi saya melihat jika dalam praktiknya pendekatan ini lebih interaktif, beragam tahap saling berhubungan dan tidak harus selalu sesuai dengan susunan yang telah disajikan.

Pendekatan tersebut dapat dijabarkan lebih detail dalam langkah-langkah analisis sebagai berikut:

Bagan 1.5. Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif



Sumber: Creswell, John W (2010)

Langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.

Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

Langkah 2. Membaca keseluruhan data.

Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana nada gagasan-gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi itu? Pada tahap ini, para peneliti kualitatif terkadang menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.

Langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data.

Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya (Rossman & Rallis, 1998:171). Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf) atau gambar-gambar tersebut ke dalam kategori-kategori, kemudian melabeli kategori-kategori ini dengan istilah-istilah khusus, yang sering kali didasarkan pada istilah/bahasa yang benar-benar berasal dari partisipan.

Langkah 4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.

Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu. Peneliti dalam membuat kode-kode untuk mendeskripsikan semua informasi ini, lalu menganalisisnya untuk proyek studi kasus, etnografi, atau penelitian naratif. Setelah itu, terapkanlah proses coding untuk membuat sejumlah kecil tema atau kategori, bisa lima hingga tujuh kategori. Tema-tema inilah yang biasanya menjadi hasil utama dalam penelitian kualitatif dan sering kali

digunakan untuk membuat judul dalam bagian *hasil penelitian*. Meski demikian, tema-tema ini sebaiknya diperkuat dengan berbagai kutipan, seraya menampilkan perspektif-perspektif yang terbuka untuk dikaji ulang.

Langkah 5. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.

Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Pendekatan ini bisa meliputi pembahasan tentang kronologi peristiwa, tema-tema tertentu (lengkap dengan subtema-subtema, ilustrasi-ilustrasi khusus, perspektif-perspektif, dan kutipan-kutipan), atau tentang keterhubungan antartema. Para peneliti kualitatif juga dapat menggunakan visual-visual, gambar-gambar atau tabel-tabel untuk membantu menyajikan pembahasan ini. Mereka dapat menyajikan suatu proses (sebagaimana dalam *grounded theory*), menggambarkan secara spesifik lokasi penelitian (sebagaimana dalam etnografi), atau memberikan informasi deskripsi tentang partisipan dalam sebuah tabel (sebagaimana dalam studi kasus dan etnografi).

Langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data.

Mengajukan pertanyaan seperti “Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan (Lincoln & Guba, 1985). Pelajaran ini dapat berupa interpretasi pribadi si peneliti, dengan berpijak pada kenyataan bahwa peneliti membawakebudayaan, sejarah, dan pengalaman pribadinya ke dalam penelitian. Interpretasi juga bisa berupa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi

yang berasal dari *literature* atau *teori*. Dalam hal ini, peneliti menegaskan apakah hasil penelitiannya membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya. Interpretasi/pemaknaan ini juga bisa berupa *pertanyaan-pertanyaan baru* yang perlu dijawab selanjutnya: pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari data dan analisis, dan bukan dari hasil ramalan peneliti (Creswell, 2010: 284).

1.6.9 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan dari datanya. Untuk menguji kualitas data penelitian peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.

Denzin membedakan empat macam teknik triangulasi yaitu :

a. Triangulasi data atau sumber data

Triangulasi data ini dimaksudkan agar dalam pengumpulan data peneliti menggunakan banyak sumber data. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kuantitatif.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan secara pribadi dengan apa yang dikatakan di depan umum.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dari berbagai lapisan masyarakat baik tingkat pendidikan, status pekerjaan misalnya.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen lainnya.

b. Triangulasi metode

Di dalam teknik ini, menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis. Pada triangulasi ini, terdapat dua strategi yaitu :

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa tehnik pengumpulan data.
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

c. Triangulasi peneliti

Diharapkan dengan adanya beberapa peneliti yang melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yang sama, akan mendapatkan hasil yang sama.

Dalam penelitian ini variasi triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data dan metode. Hal ini dikarenakan pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Dengan menggunakan triangulasi sumber data, maka diperoleh data yang mendalam yang diperoleh dari sudut pandang yang berbeda antara sumber satu dengan sumber-sumber yang lainnya. Sehingga peneliti dapat menghasilkan data yang tidak hanya pada satu sudut

pandang saja melainkan pada berbagai sudut pandang yang akan berpengaruh pada analisis dalam penelitian ini.

Kemudian dengan triangulasi metode nantinya akan diperoleh jawaban yang bervariasi dari berbagai metode-metode yang digunakan oleh peneliti dalam rangka memperoleh informasi dari informan dan dari jawaban yang bervariasi.